



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 320/01.9/HK/2019

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
- b. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penataan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomer 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, merupakan acuan bagi perangkat daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI KLUNGKUNG,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Klungkung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Klungkung

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

MANAJERIAL

KLK. 01
Perencanaan
Pembangunan

KLK. 02
Pengelolaan Keuangan
dan aset

KLK. 03
Pengelolaan SDM

KLK. 04
Pengelolaan Manajemen
Pengawasan

UTAMA

KLK. 05
Pelestarian dan pengembangan
kebudayaan daerah

KLK. 06
Mewujudkan pembangunan manusia yang
berkualitas dan berdaya saing

KLK. 07
Penurunan angka kemiskinan dari
6,29% menjadi 3%

KLK. 08
Mewujudkan pertumbuhan
ekonomi sebesar 6% setiap tahun

KLK. 09
Mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang Profesional,
responsif, transparan, santun dan inovatif

KLK. 10
Mewujudkan ketentraman,
ketertiban umum dan stabilitas
politik yang mantap

KLK. 11
Mengurangi ketimpangan
infrastruktur antar wilayah

KLK. 12
Peningkatan kualitas lingkungan
hidup

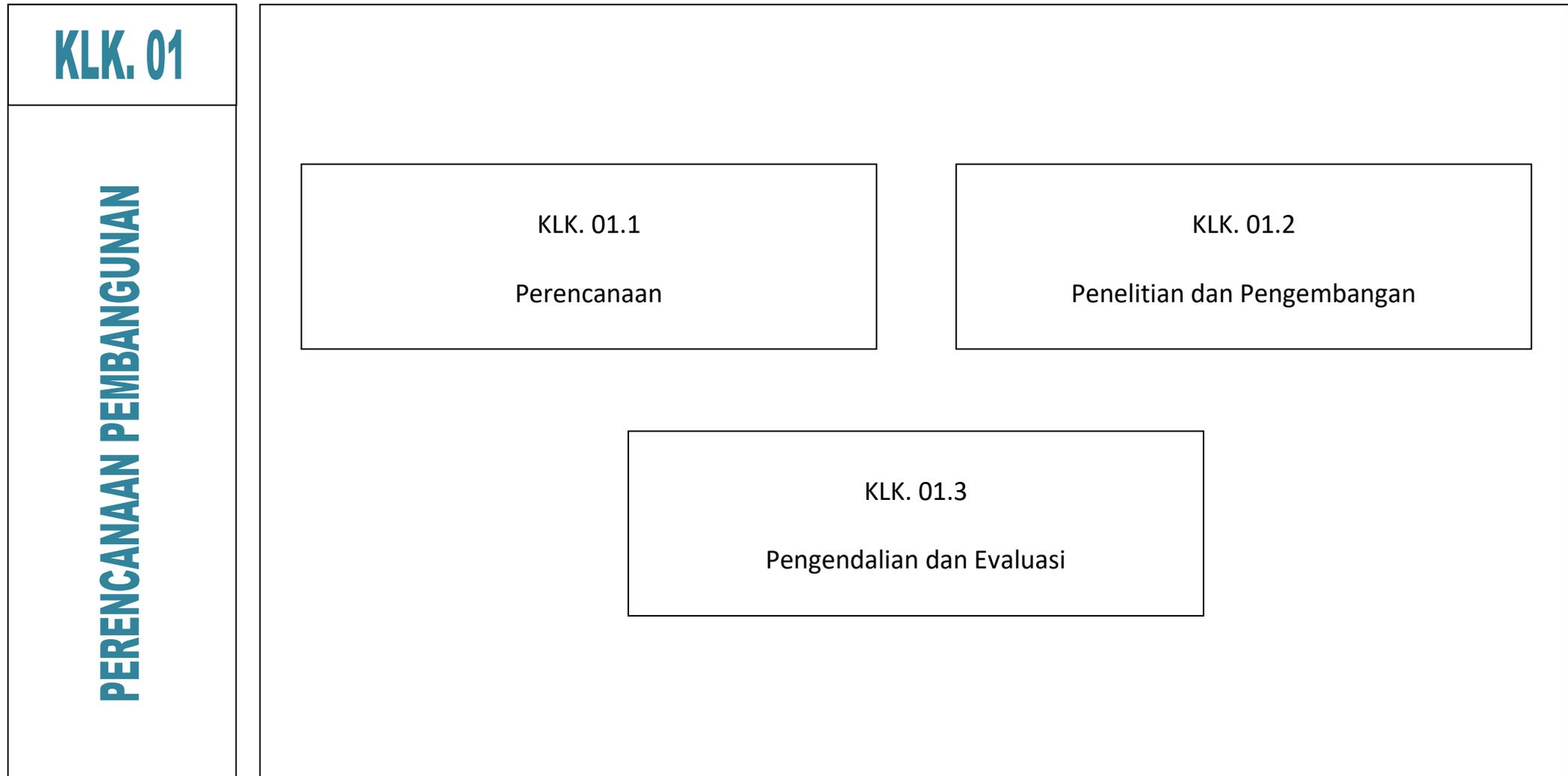
PENDUKUNG

KLK. 13
Pelayanan Informasi dan Komunikasi

KLK. 14
Layanan Hukum

**PETA PROSES BISNIS MANAJERIAL
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 01.1

PERENCANAAN

KLK. 01.1.1

Penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah

KLK. 01.1.2

Penyediaan data/informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 01.2

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KLK. 01.2.1

Penelitian dan Pengkajian dalam rangka
penyusunan dokumen perencanaan daerah

KLK. 01.1.2

Pengembangan inovasi masyarakat

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 01.3

MONITORING DAN EVALUASI

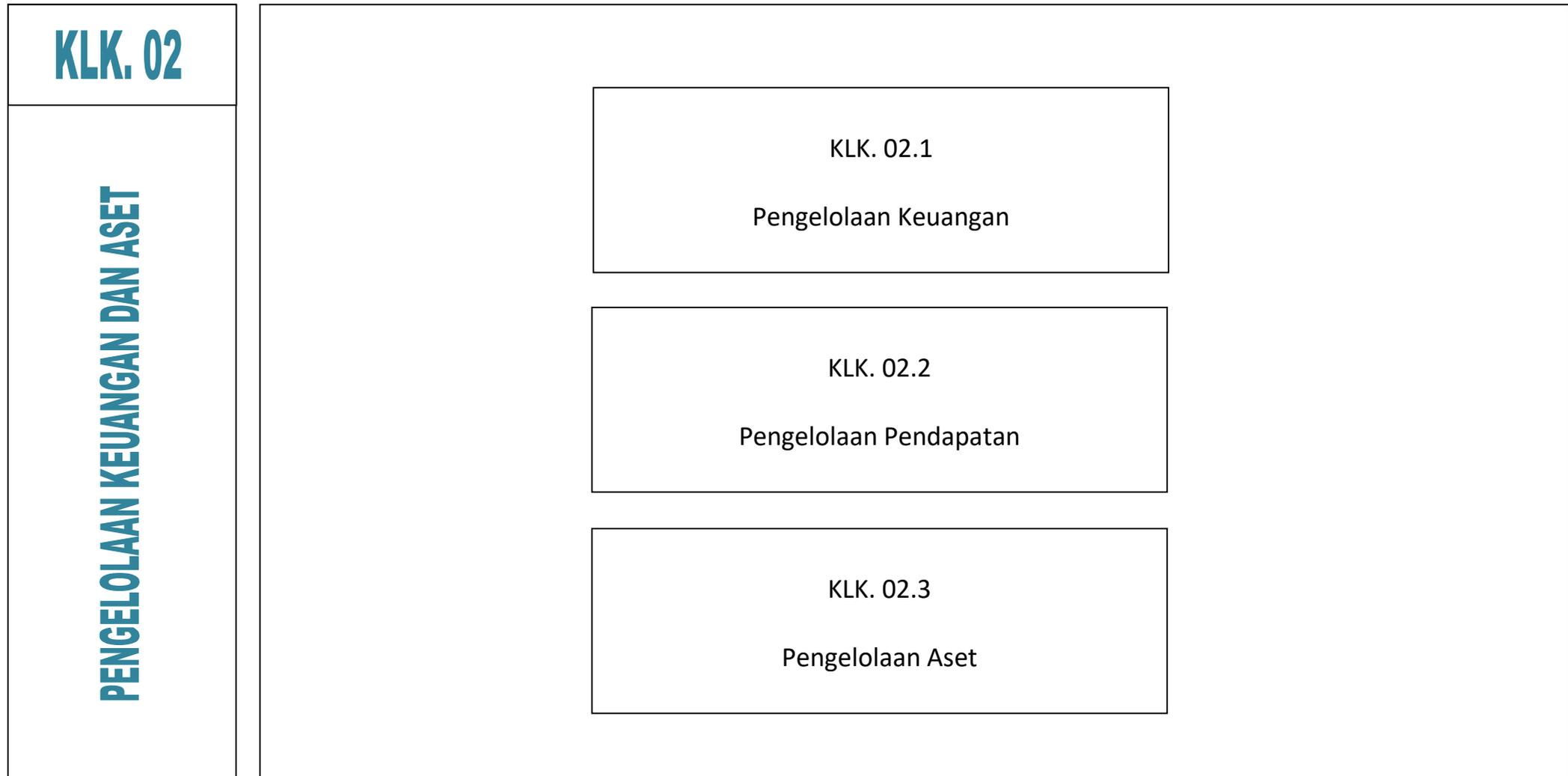
KLK. 01.3.1

Pengendalian pelaksanaan rencana
pembangunan daerah

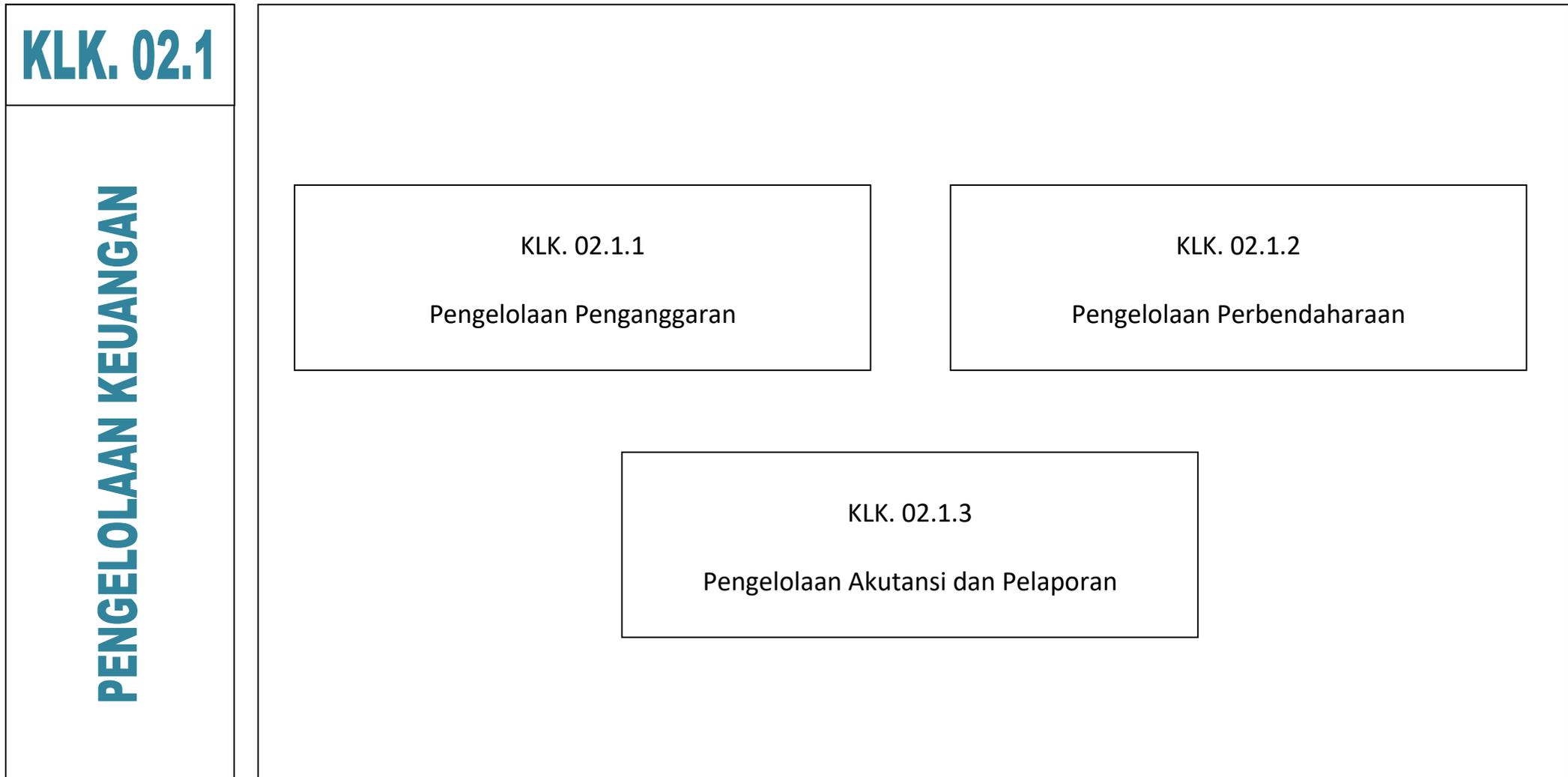
KLK. 01.3.2

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana
kerja pembangunan daerah

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 3

KLK. 02.1.1

PENGELOLAAN PENGANGGARAN

KLK. 02.1.1.1

Penyusunan APBD dan PAPBD

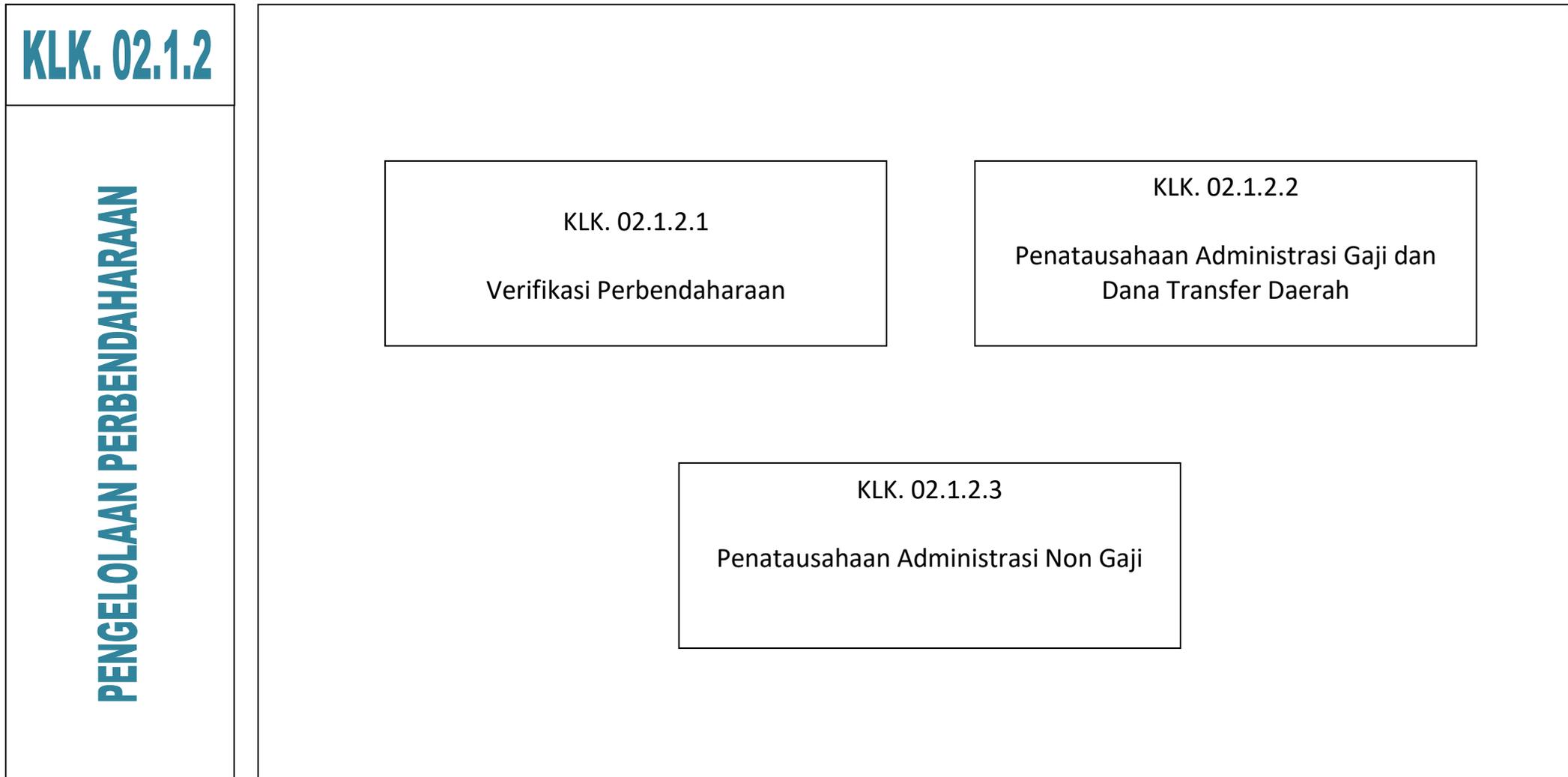
KLK. 02.1.1.2

Penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis penusunan anggaran

KLK. 02.1.1.3

Pengendalian penyusunan anggaran

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 3



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 3

KLK. 02.1.3

PENGELOLAAN AKUTANSI DAN PELAPORAN

KLK. 02.1.3.1

Melaksanakan pembukuan dan pencatatan akuntansi transaksi dan/atau kejadian keuangan daerah yang berkenaan dengan pendapatan dan penerimaan lainnya

KLK. 02.1.3.2

Melaksanakan pembukuan dan pencatatan akuntansi transaksi dan/atau kejadian keuangan daerah yang berkenaan dengan belanja dan pengeluaran lainnya

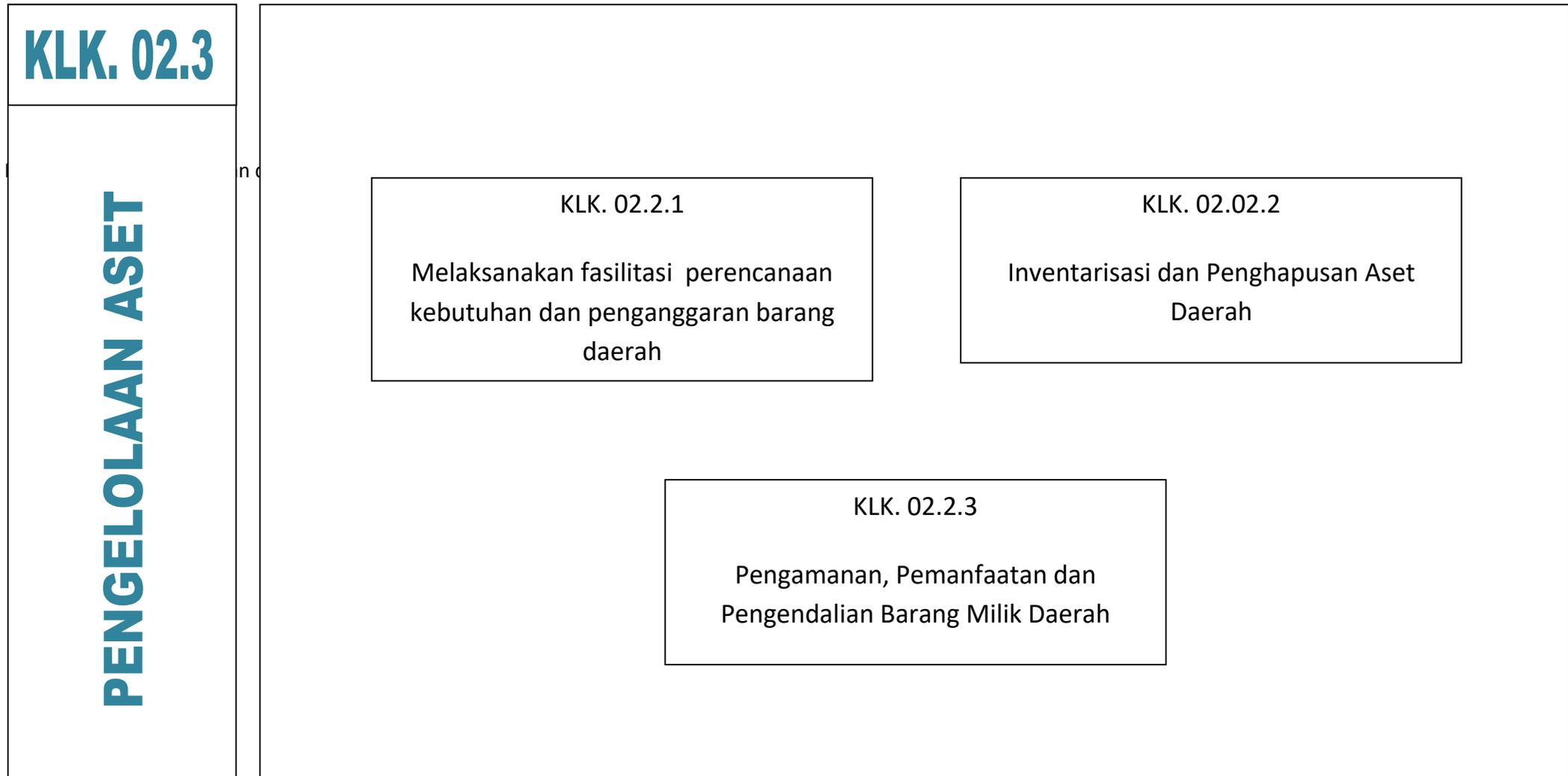
KLK. 02.1.3.3

Penyusunan laporan dan informasi keuangan daerah terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

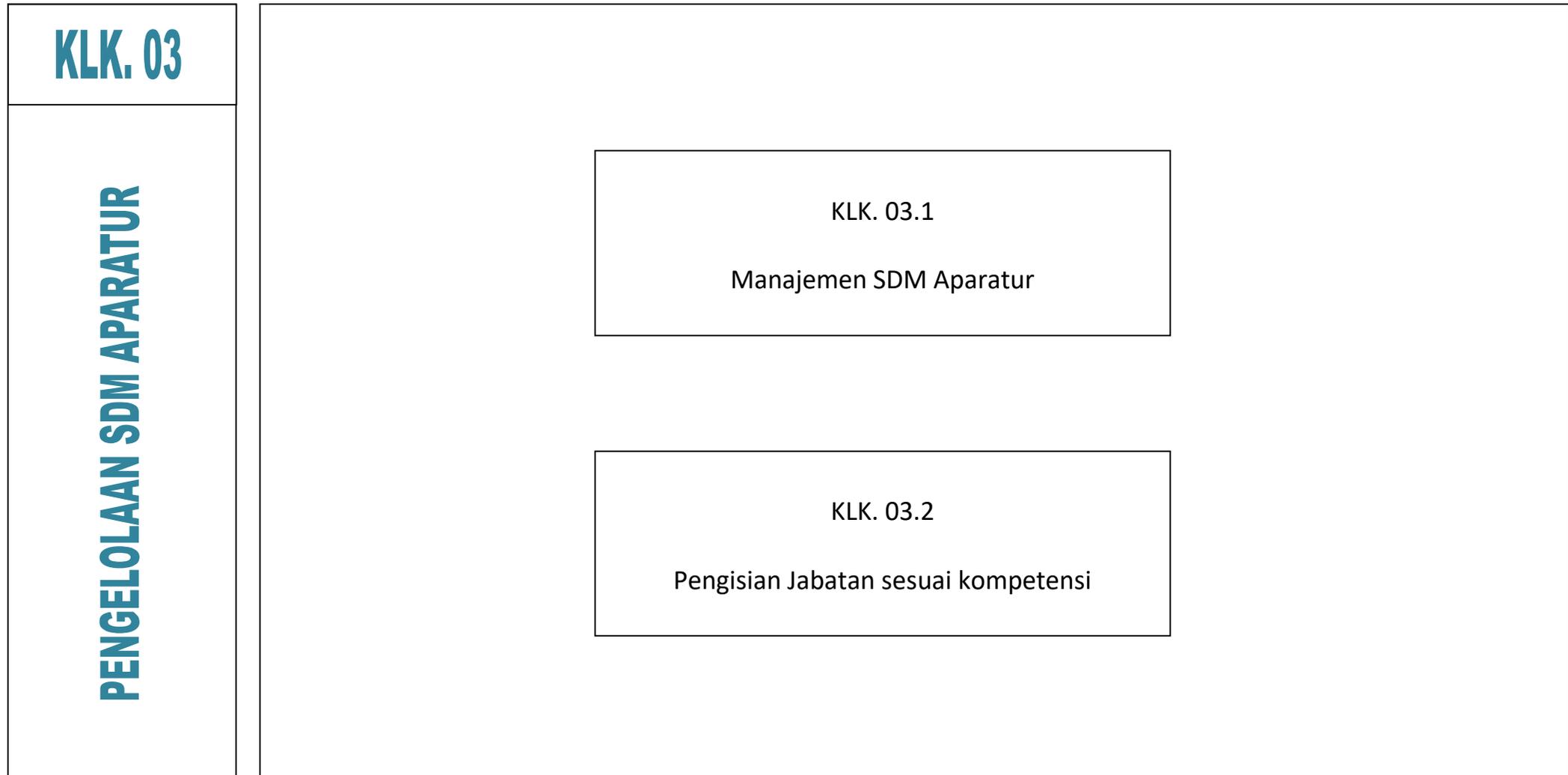
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 03.1

MANAJEMEN SDM APARATUR

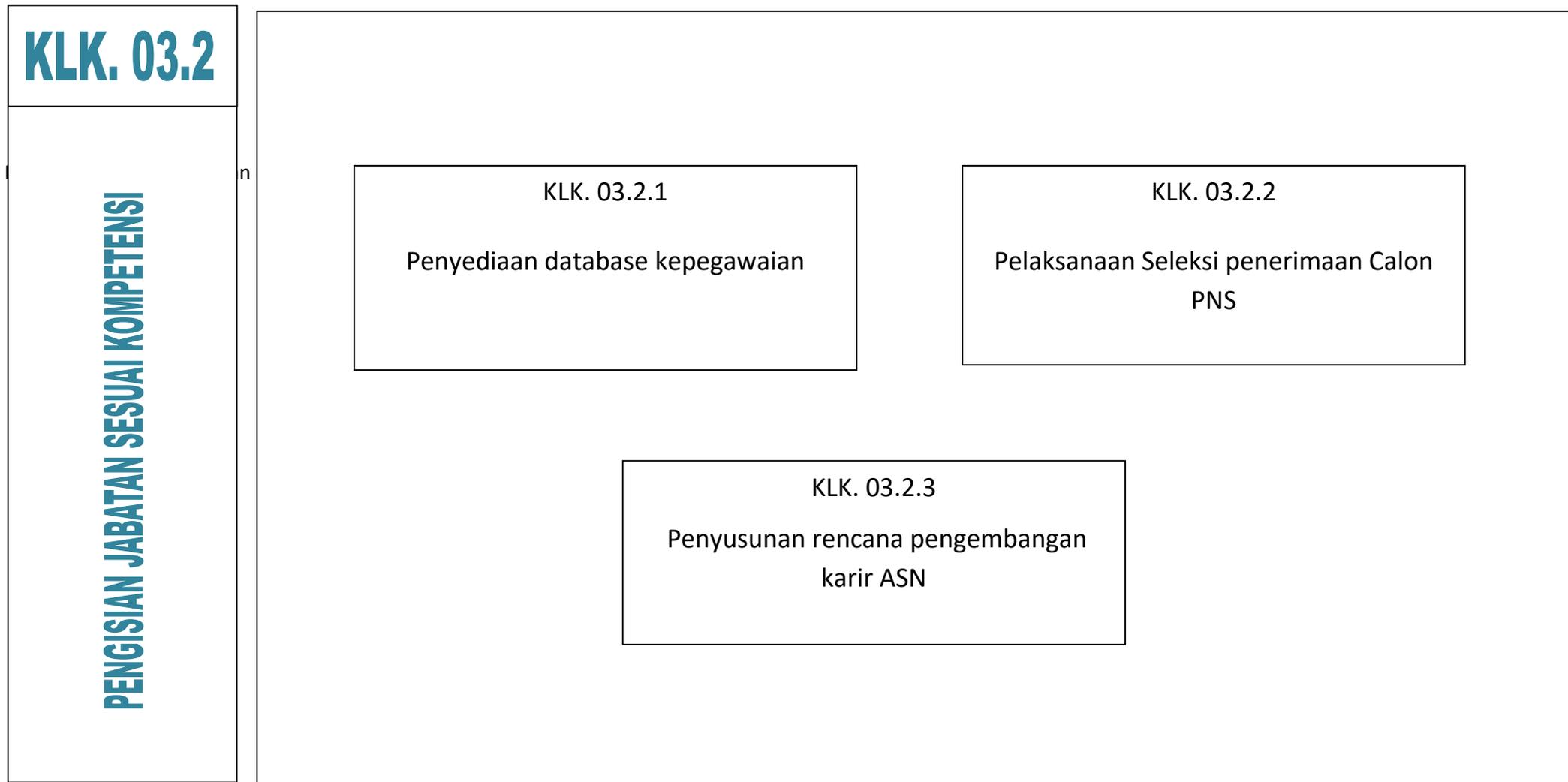
KLK. 03.1.1

Penataan sistem administrasi
kepegawaian PNS

KLK. 03.01.2

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
dan Pembinaan Pegawai

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1



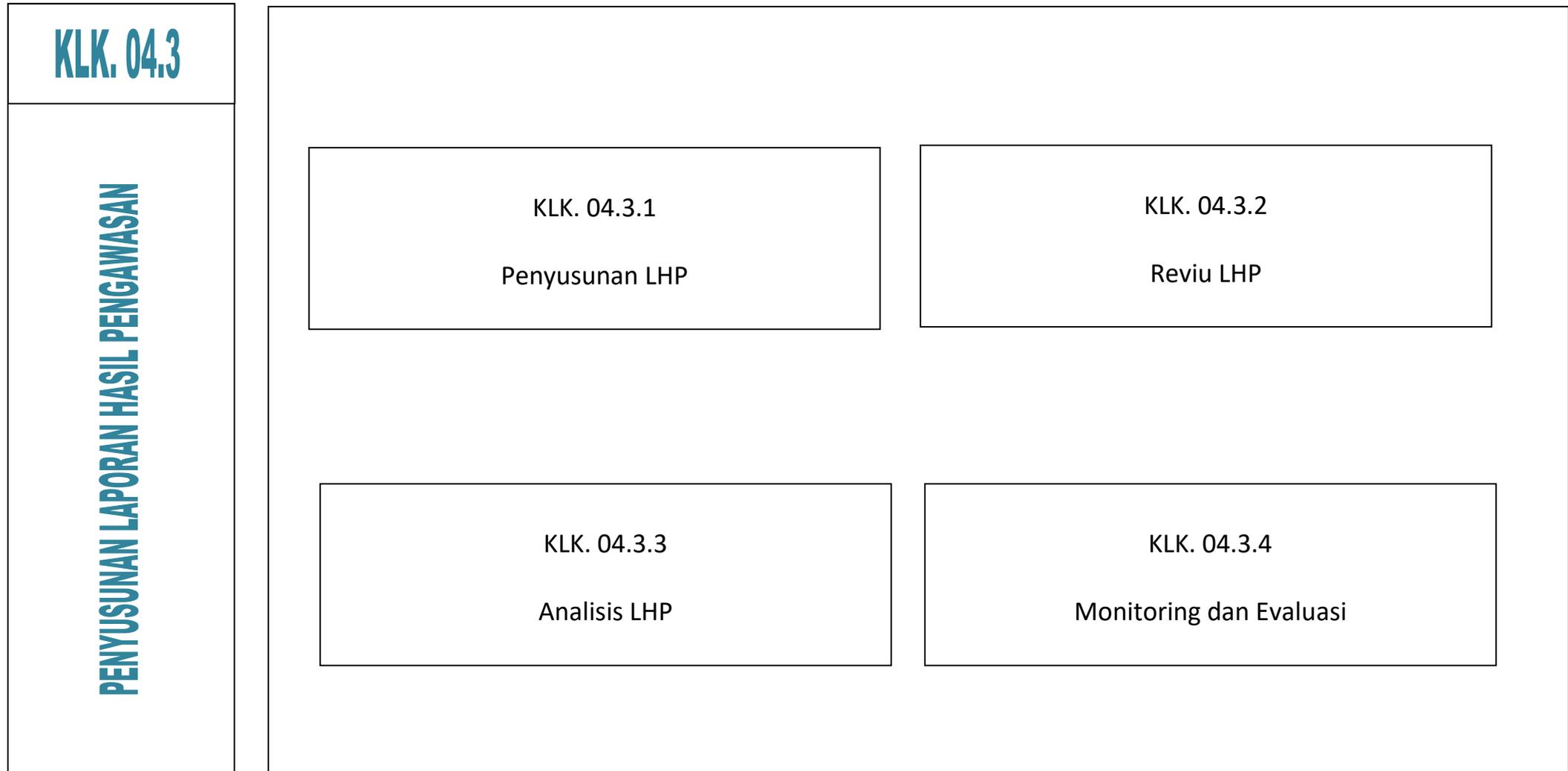
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

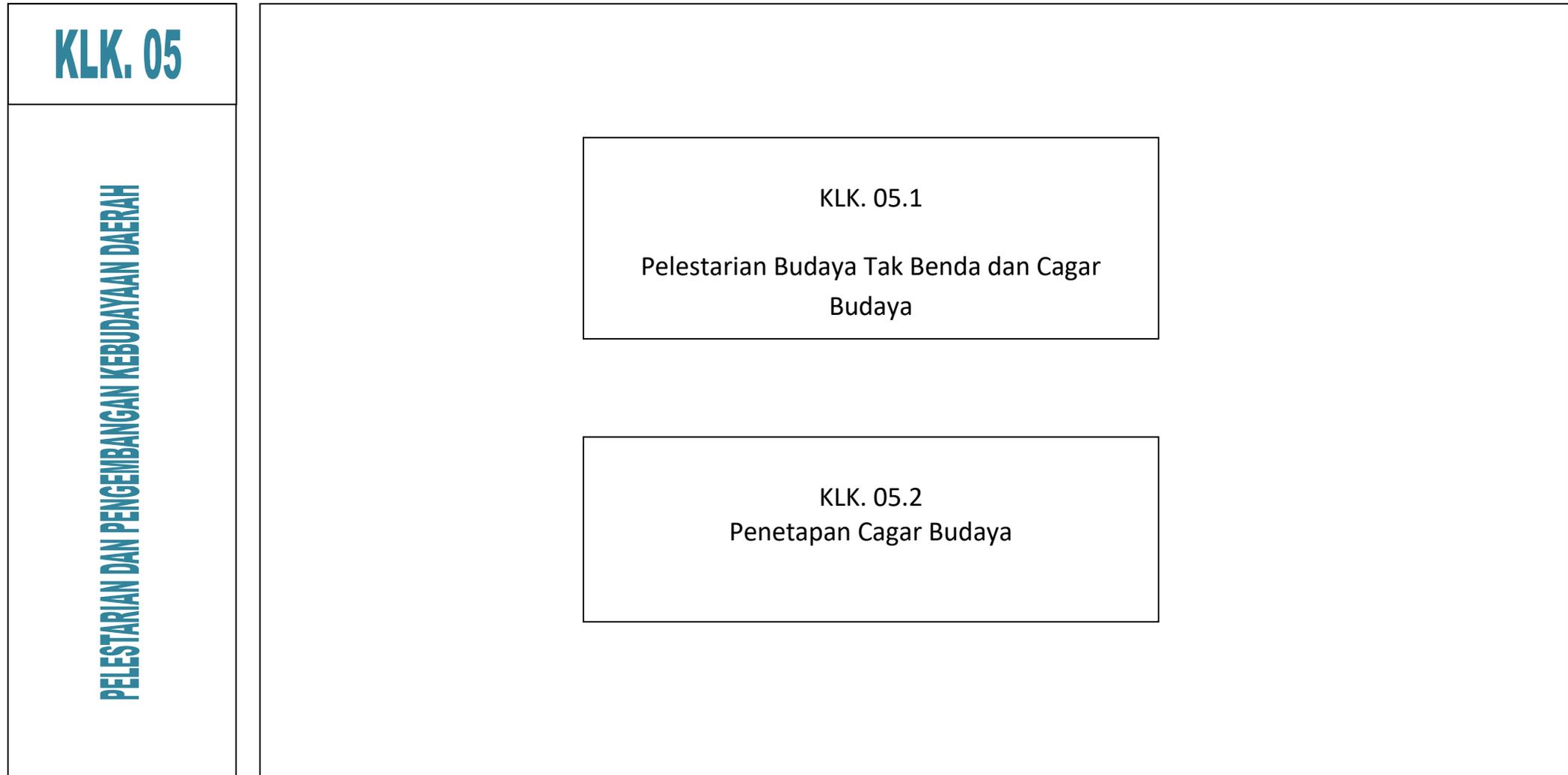


PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

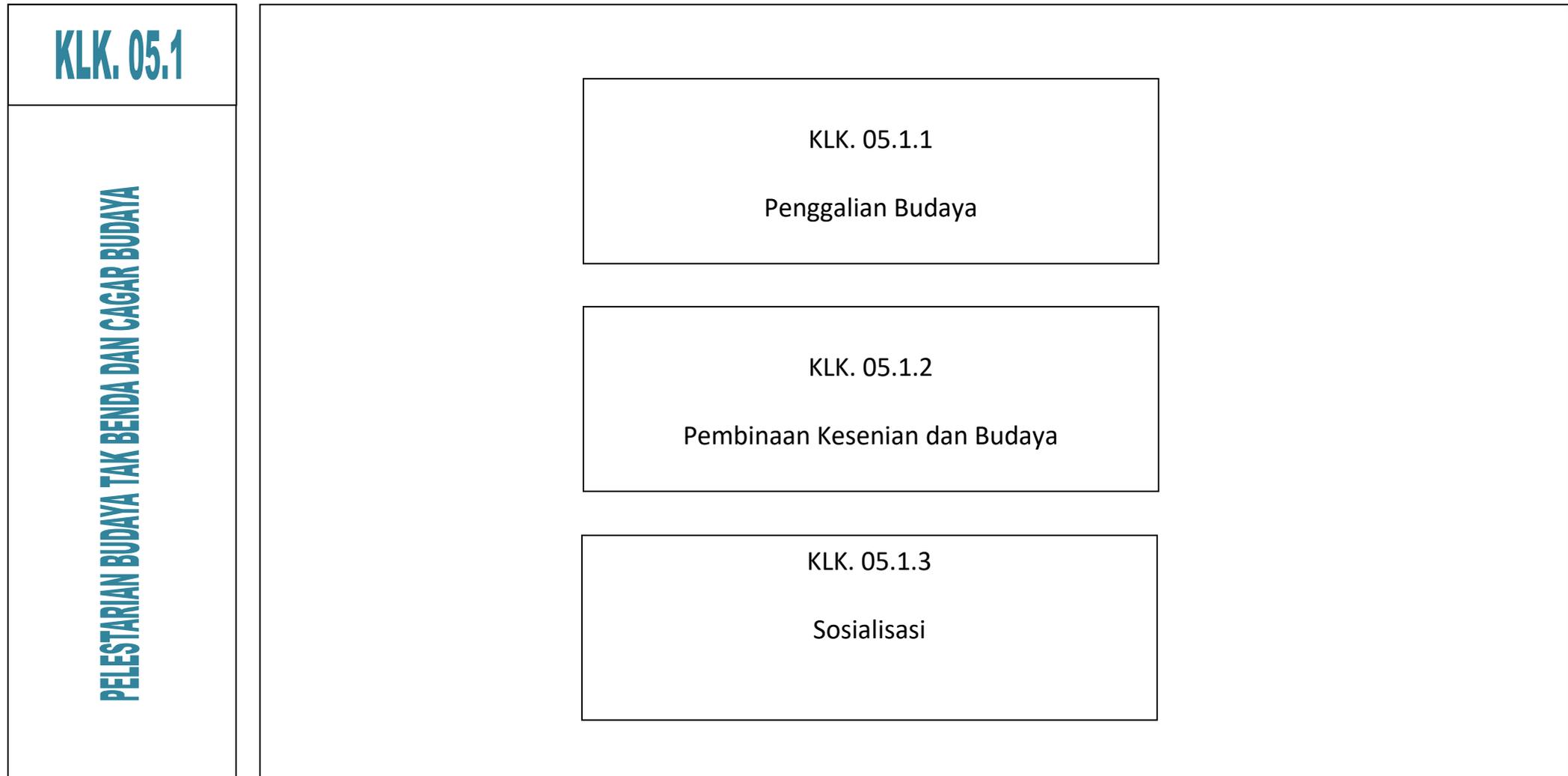


**PETA PROSES BISNIS UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

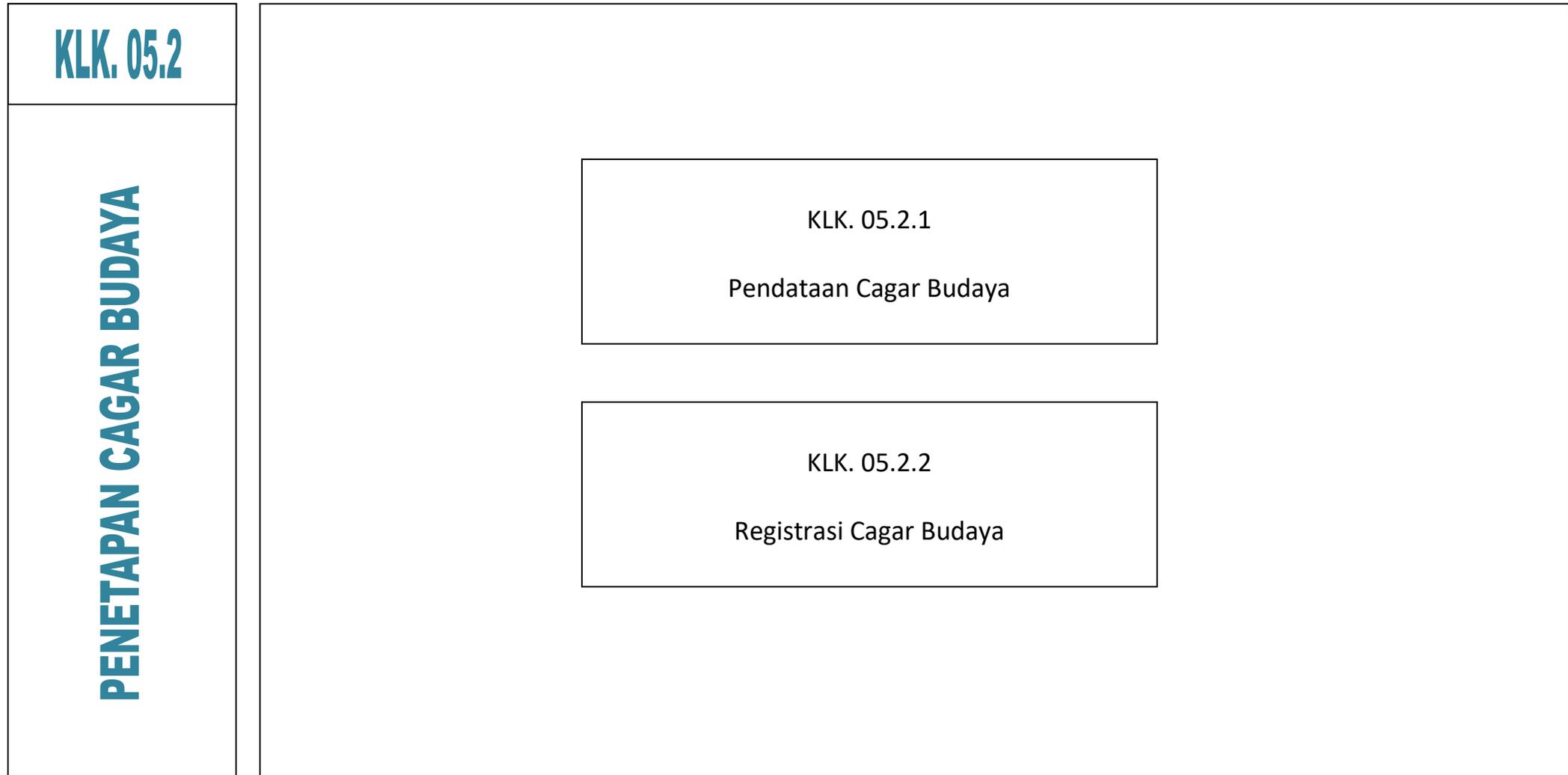
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1



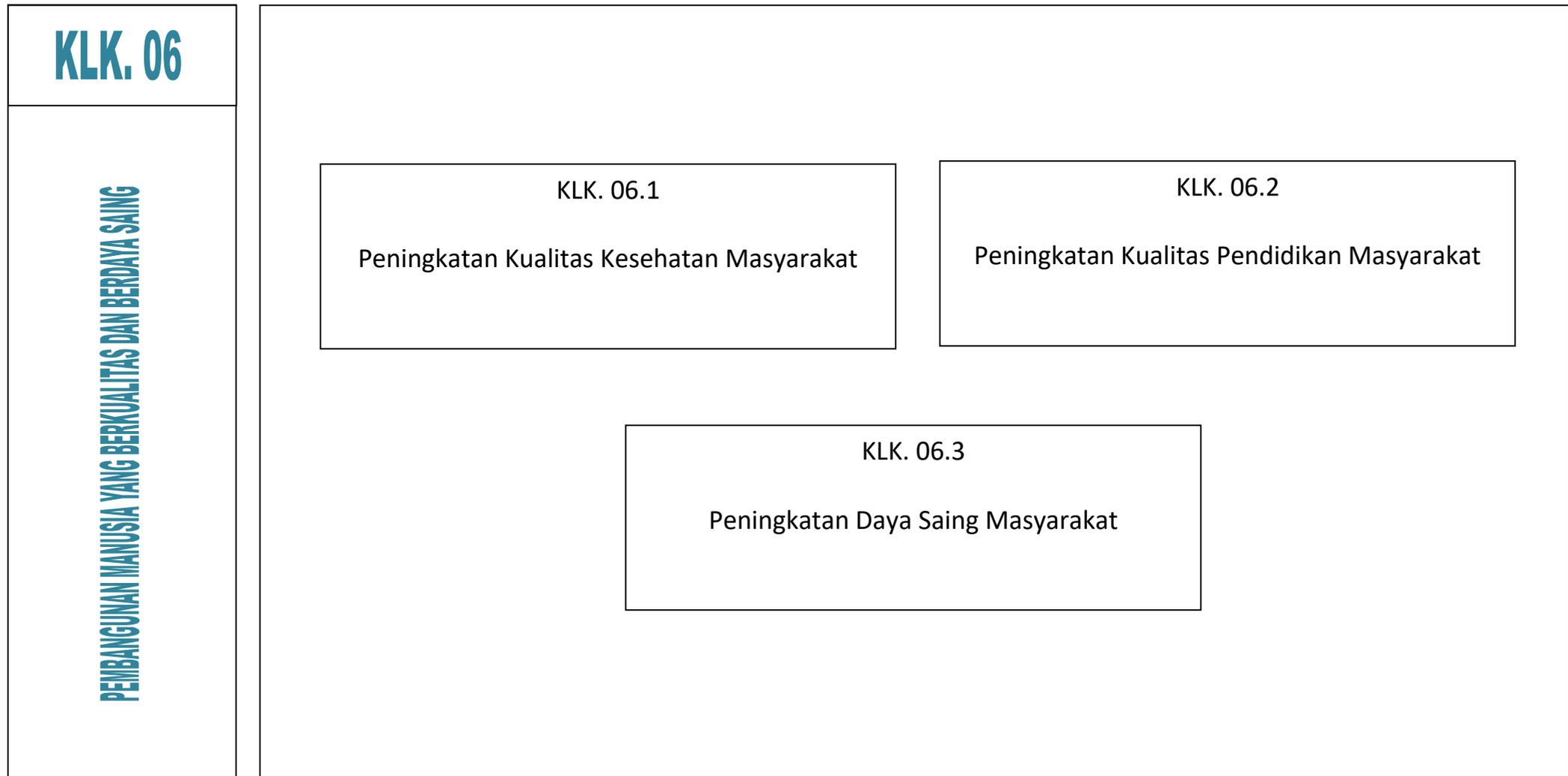
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2



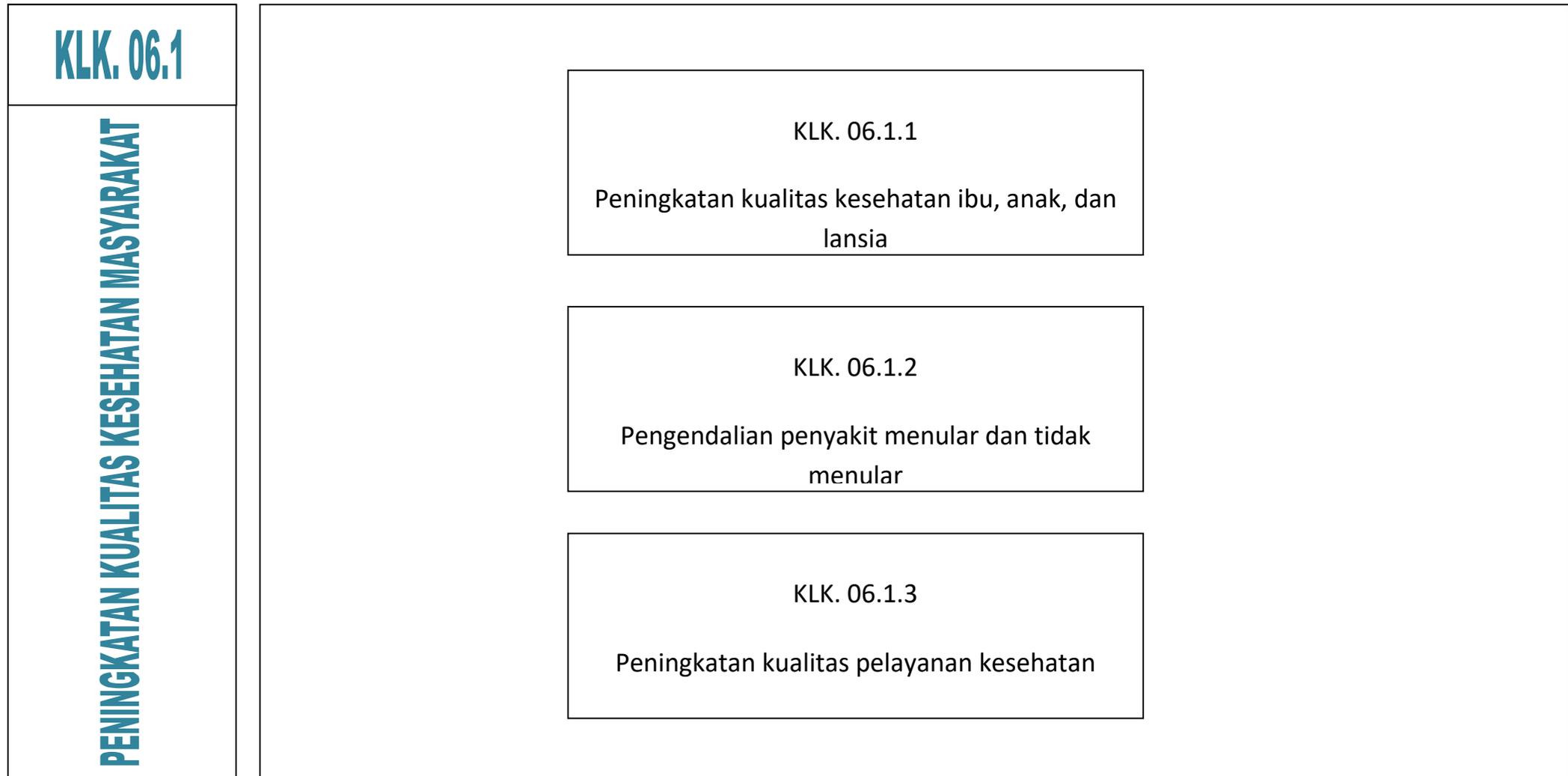
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1



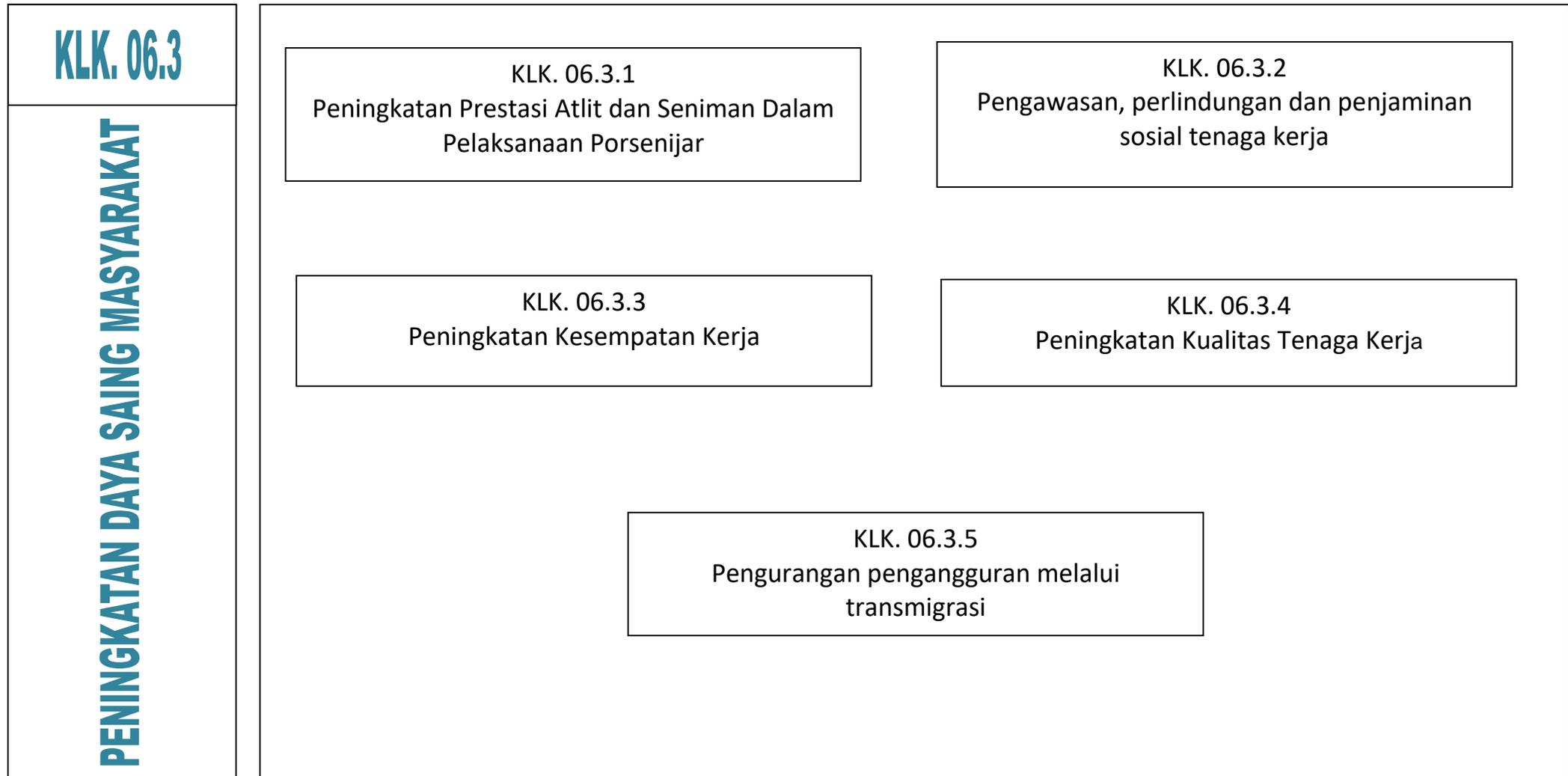
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2



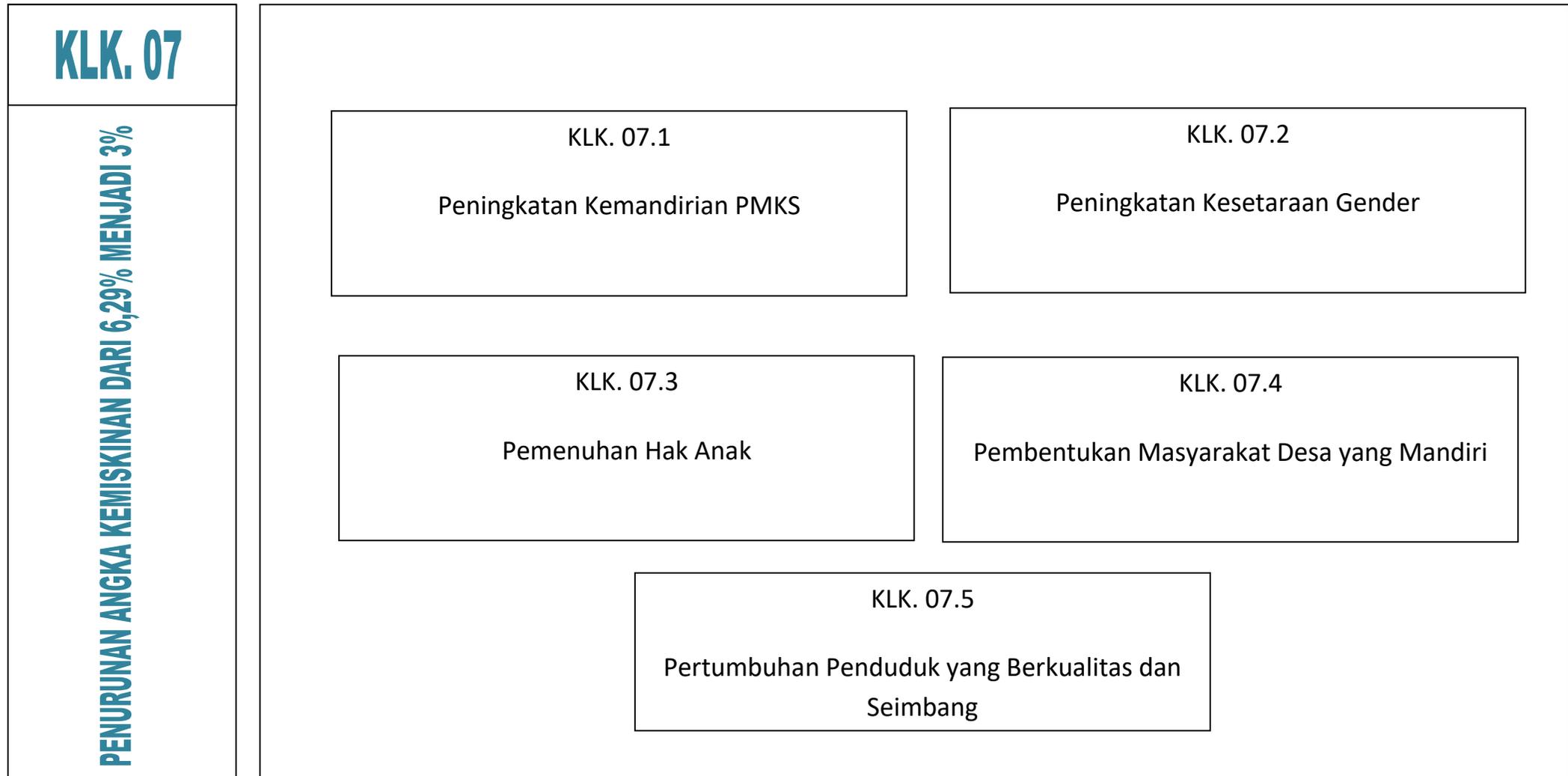
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2



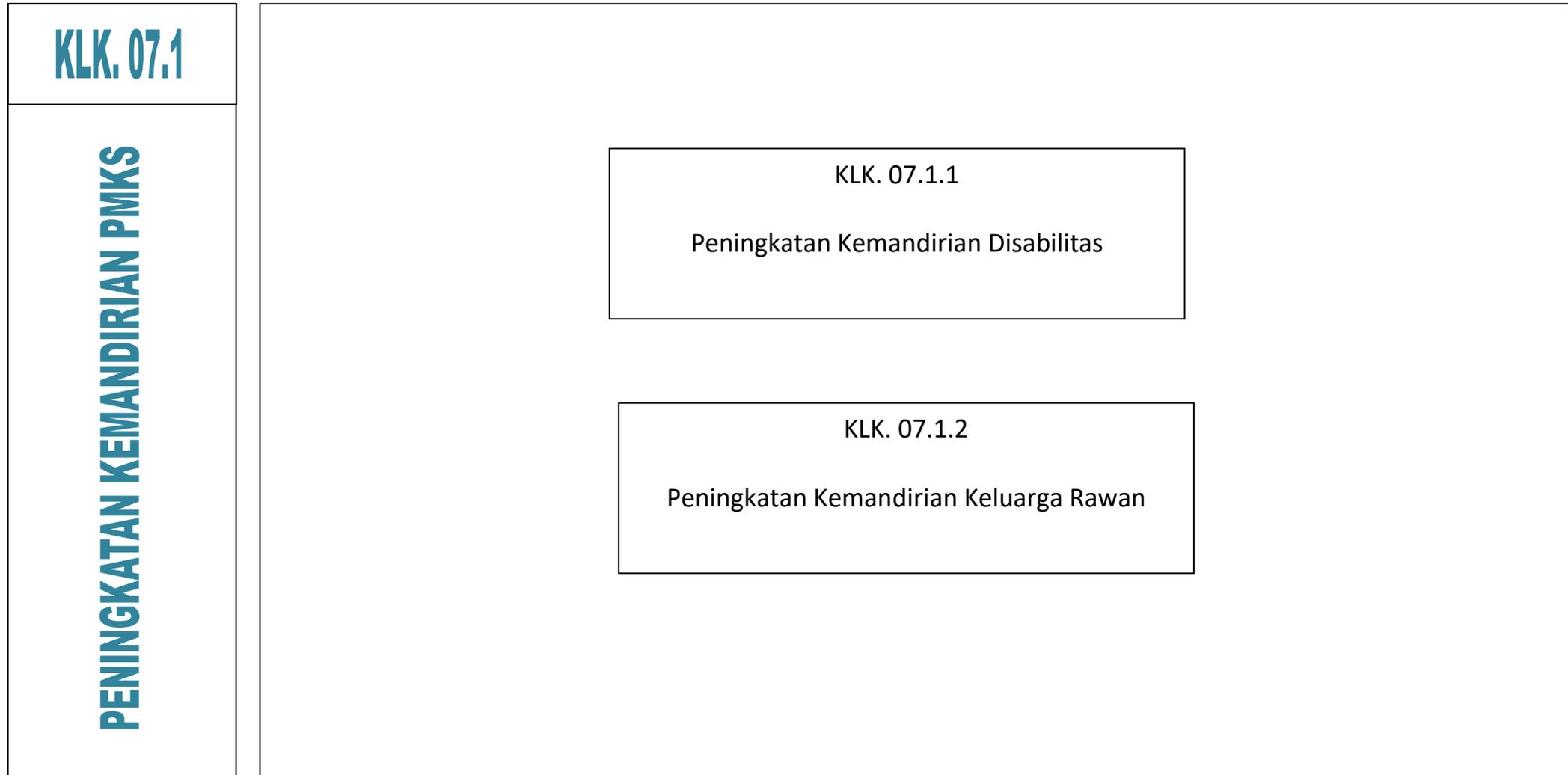
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 07.2

MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER

KLK. 07.2.1

Penurunan KDRT Terhadap Perempuan

KLK. 07.2.2

Peningkatan Peran Perempuan di Bidang
Ekonomi

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 07.3

PEMENUHAN HAK ANAK

KLK. 07.3.1

Pembentukan Kecamatan, Desa dan Kelurahan
Layak Anak

KLK. 07.3.2

Peningkatan perlindungan anak terpadu
berbasis masyarakat aktif

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 07.4

MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA YANG MANDIRI

KLK. 07.4.1

Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan
desa

KLK. 07.4.2

Peningkatan efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan desa

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 07.5

MENJUDIKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG BERKUALITAS DAN SEIMBANG

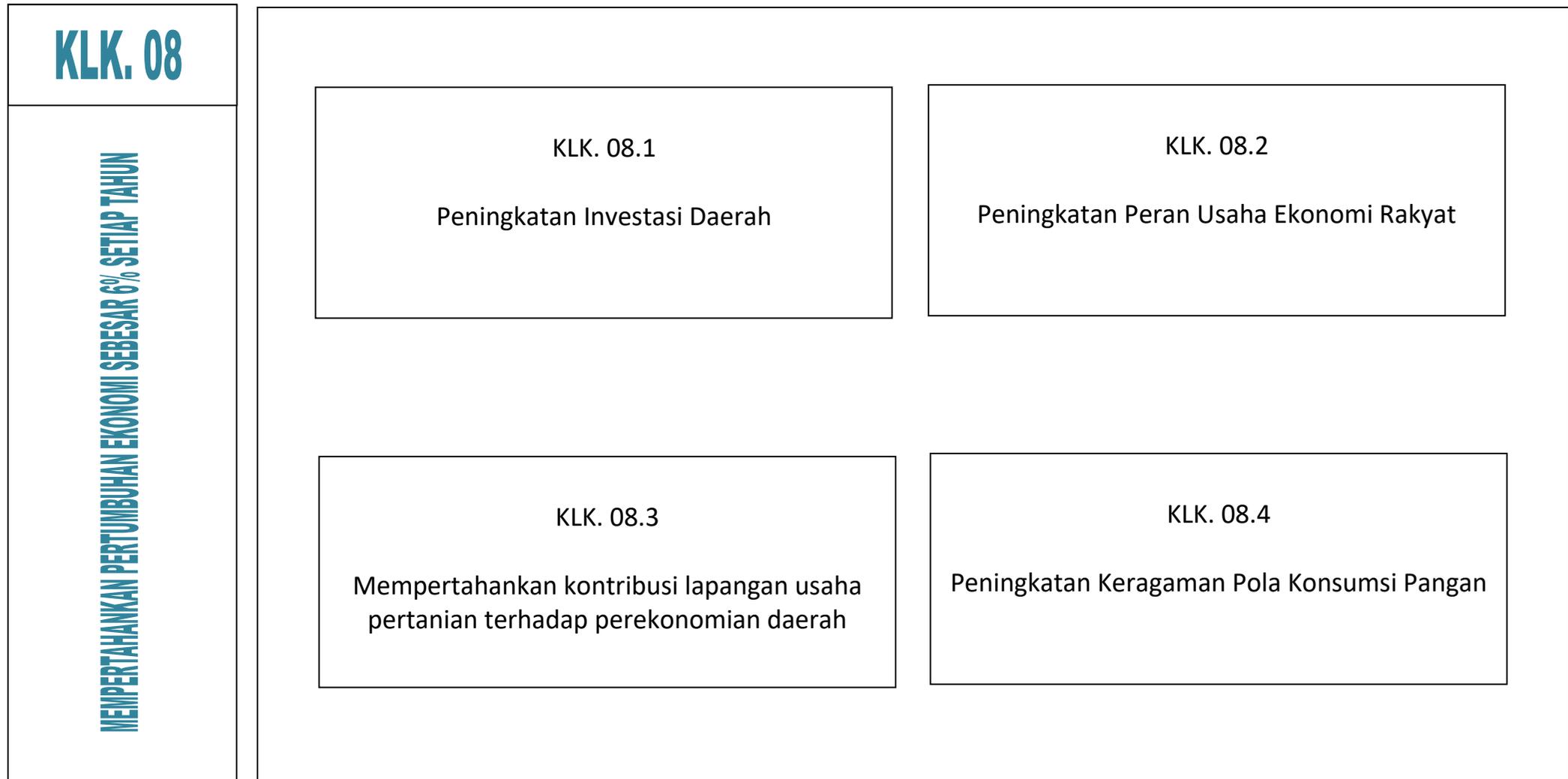
KLK. 07.5.1

Penurunan Pasangan Usia Subur yang tidak Ber
KB

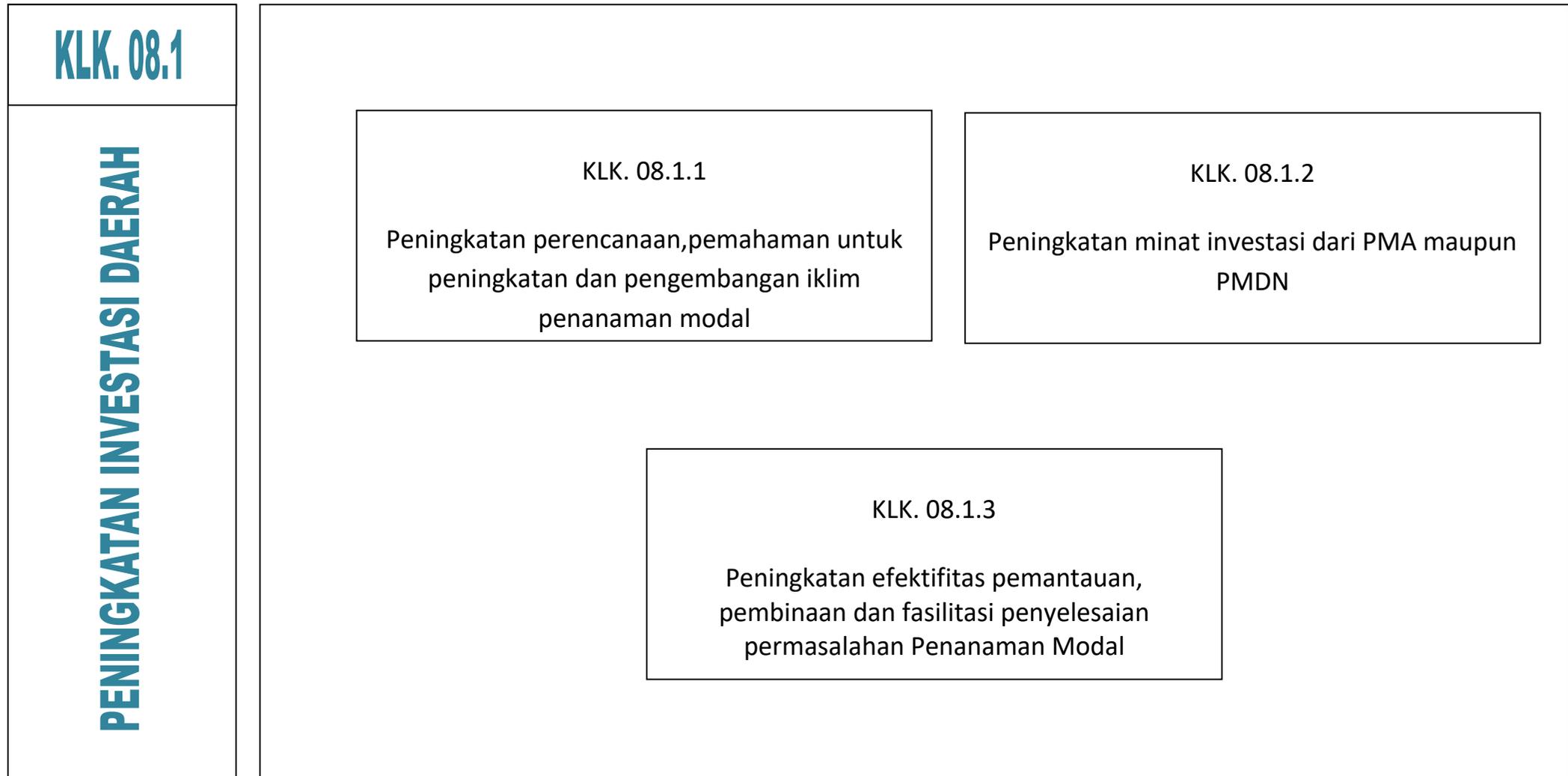
KLK. 07.5.2

Peningkatan pendewasaan usia perkawinan

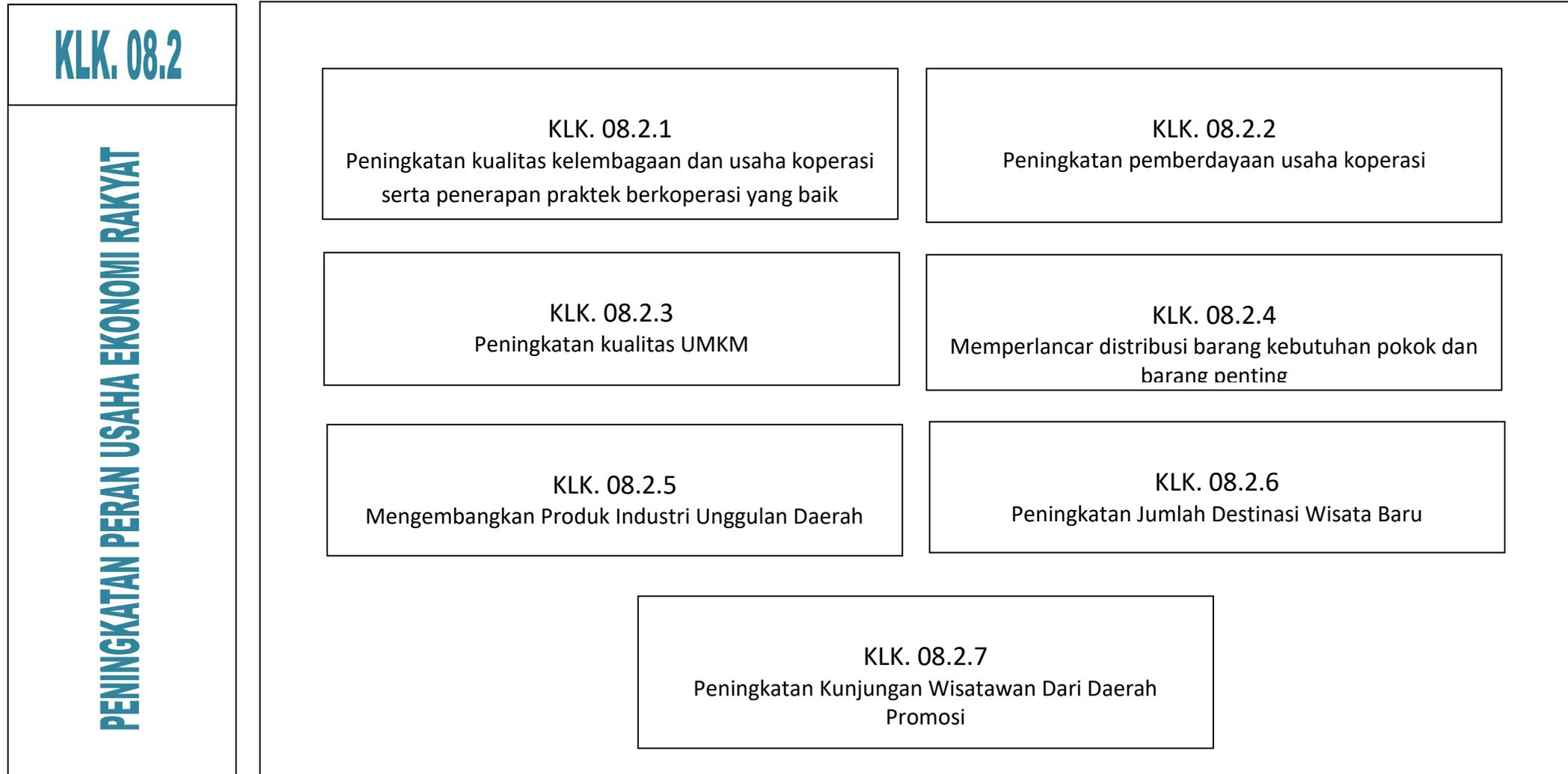
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 08.3

MEIPERTAHANKAN KONTRIBUSI LAPANGAN USAHA PERTANIAN TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH

KLK. 08.3.1

Peningkatan luas tanam yang menerapkan teknologi pertanian

KLK. 08.3.2

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

KLK. 08.3.3

Peningkatan produksi hasil perikanan

KLK. 08.3.4

Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1

KLK. 09

MEMUJUKAN PENERAPAN PERHATIAN DAERAH YANG PROFESIONAL, RESPONSIF, TRANSPARAN, SANTUN DAN INOVATIF

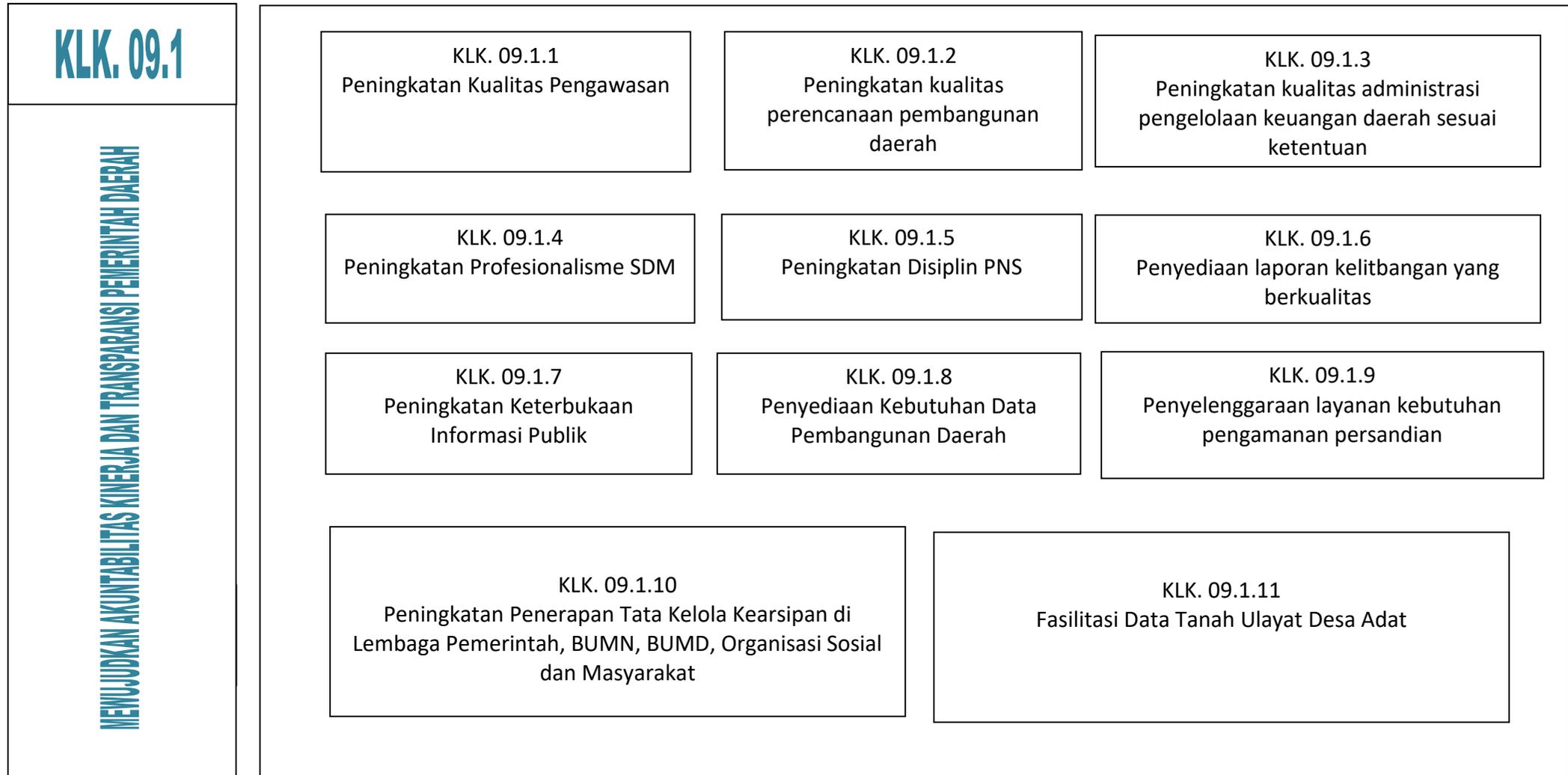
KLK. 09.1

Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan
Transparansi Pemerintah Daerah

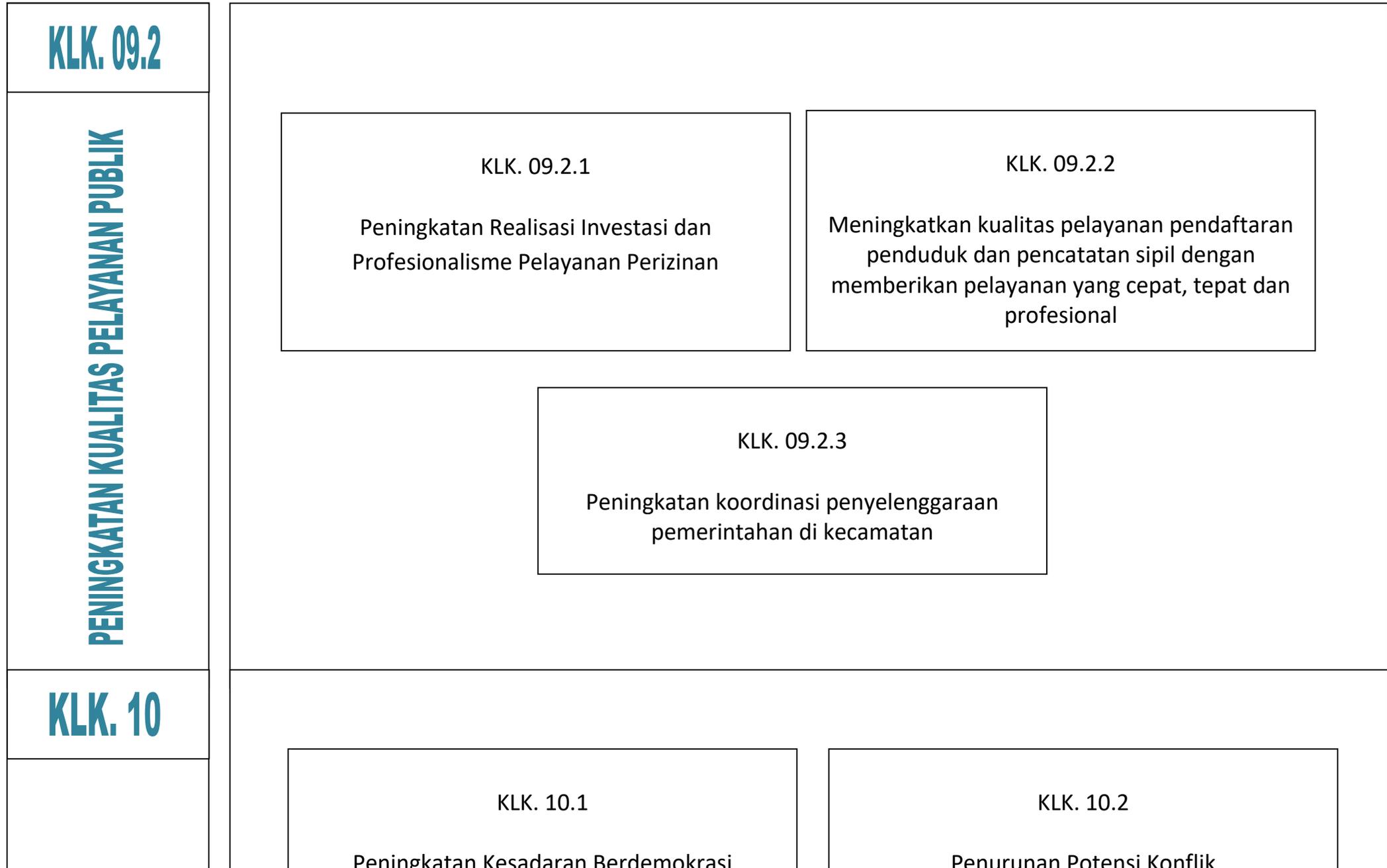
KLK. 09.2

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

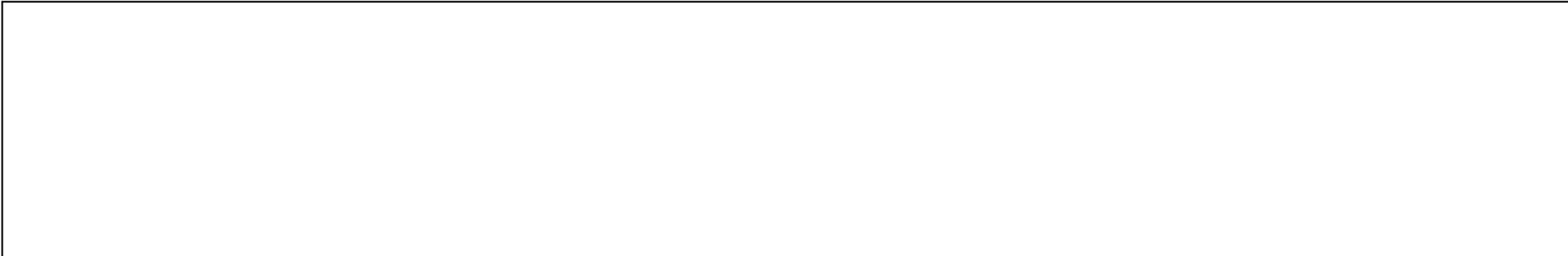


KLK. 10.3
Penurunan Tingkat Resiko Bencana

KLK. 10.4
Peningkatan Ketaatan Masyarakat Terhadap
Peraturan Perundang-undangan

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 10.1



PENINGKATAN KESADARAN BERDEMOKRASI

KLK. 10.1.1

Peningkatan Peran Generasi Muda Dalam
Wawasan Kebangsaan

KLK. 10.1.2

Peningkatan Penanganan Konflik Sosial

KLK. 10.1.3

Peningkatan Partisipasi Wanita Dalam
Menggunakan Hak Pilih

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 10.2

PENURUNAN POTENSI KONFLIK

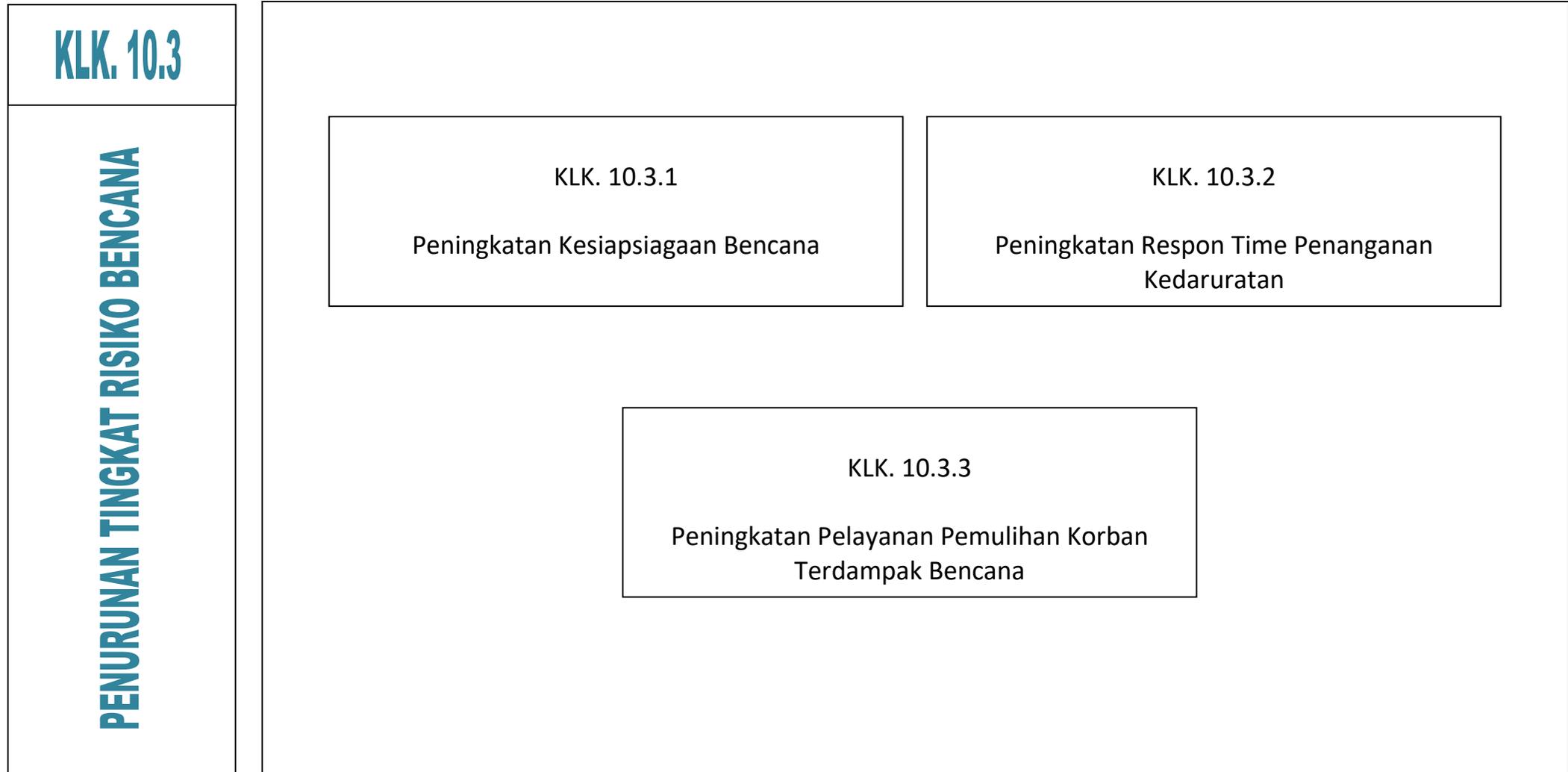
KLK. 10.2.1

Penanganan Konflik Sosial Yang Terjadi

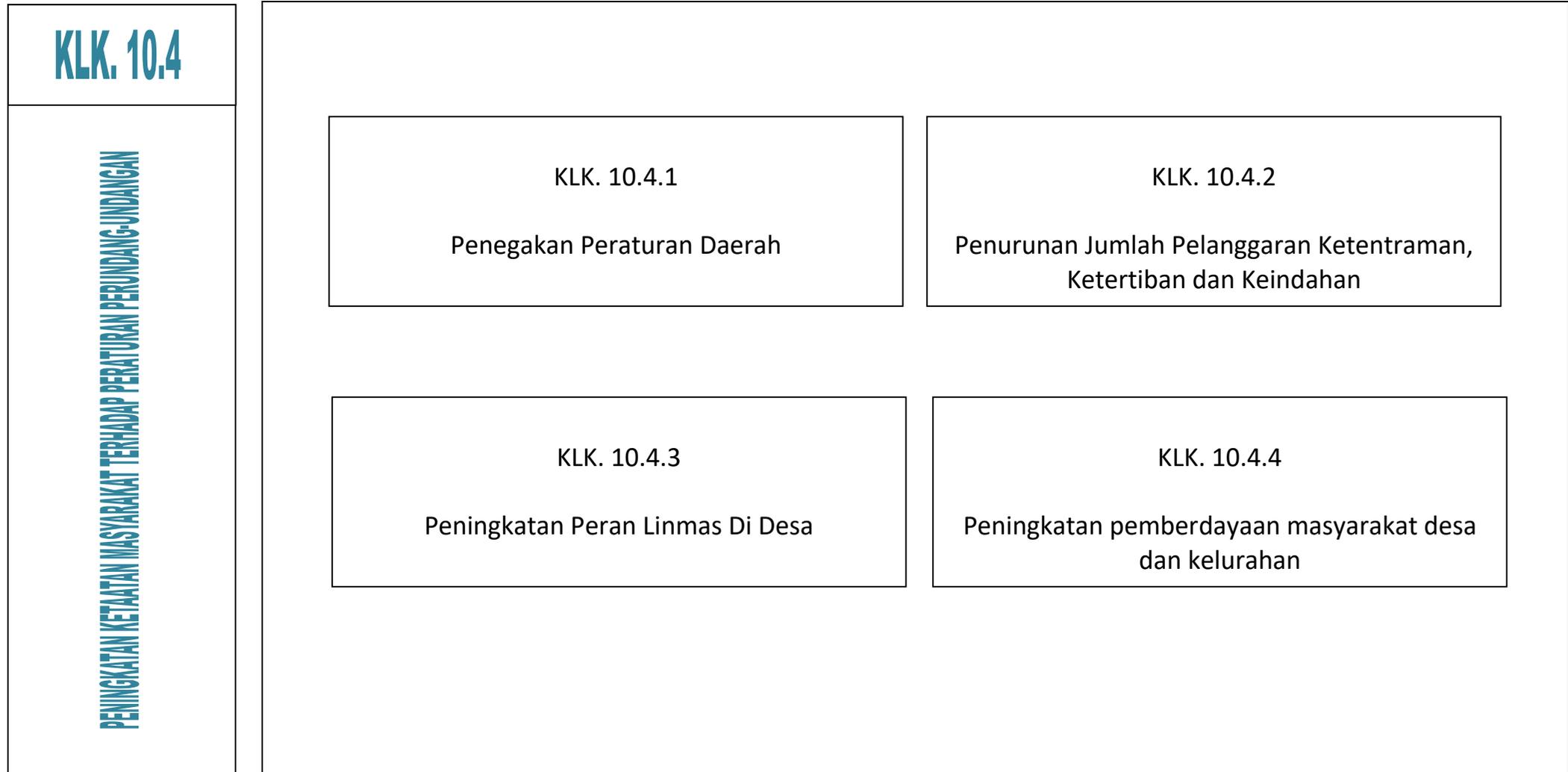
KLK. 10.2.2

Pencegahan Terjadinya Konflik Sosial

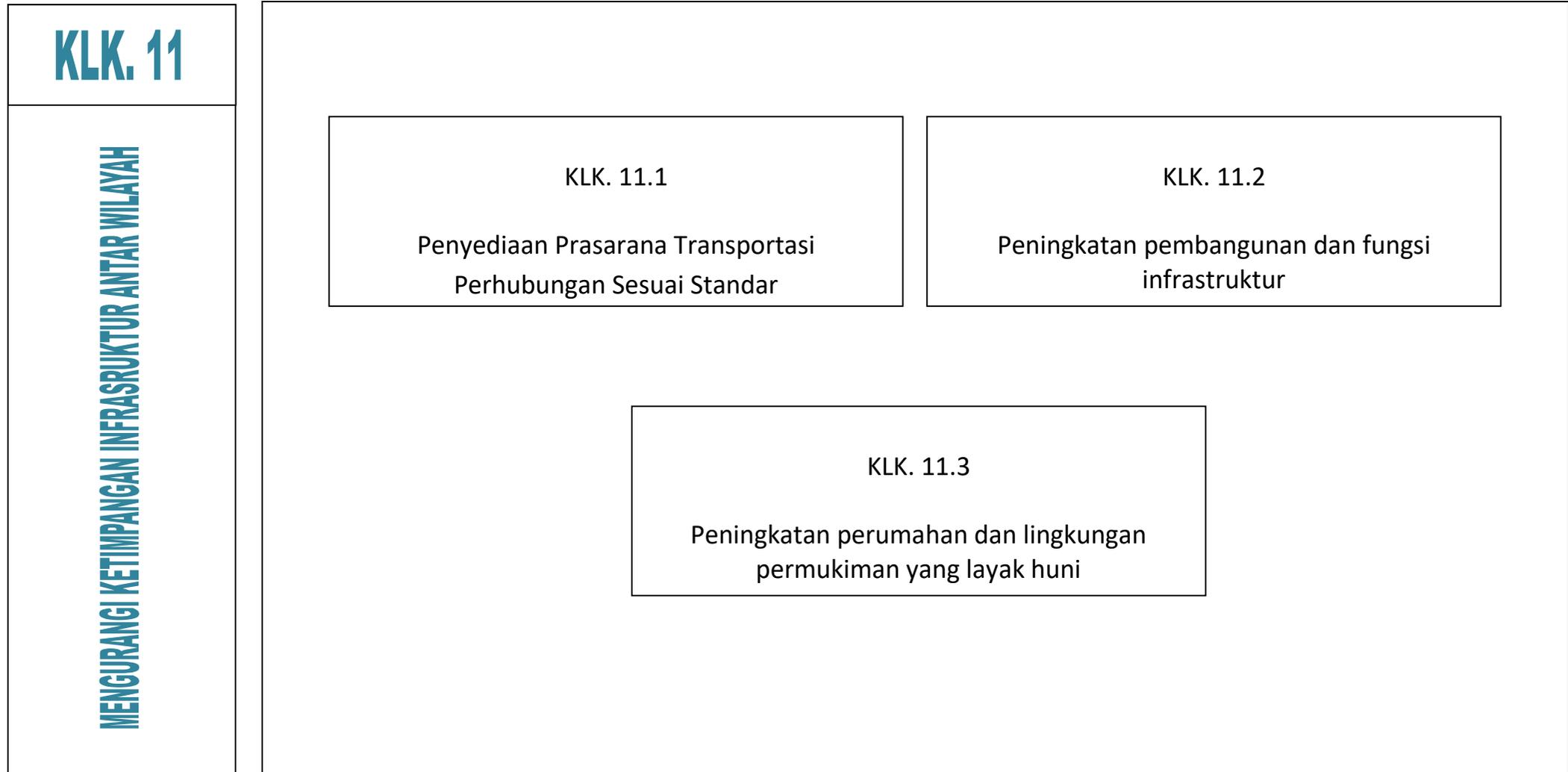
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2



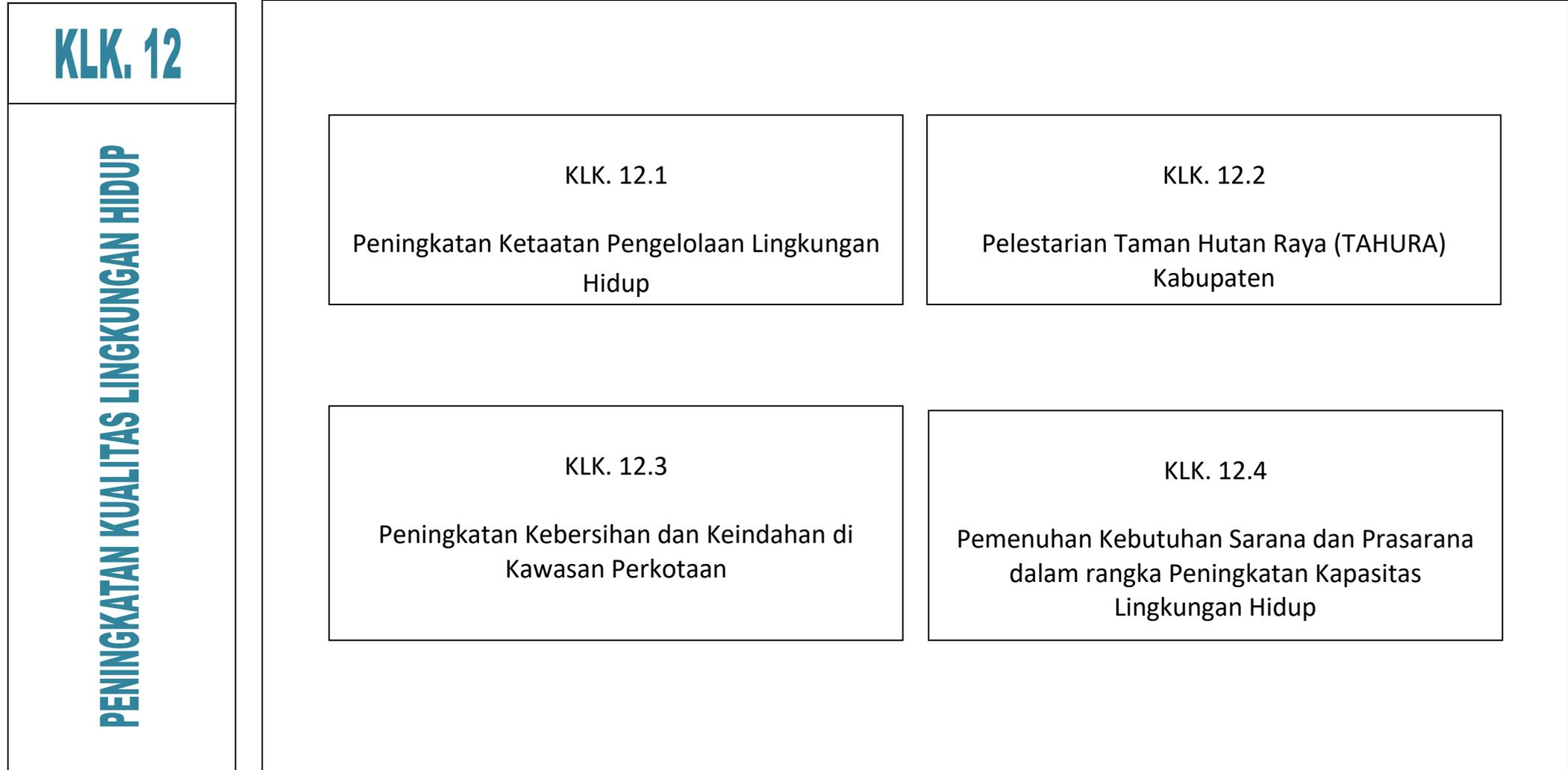
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1

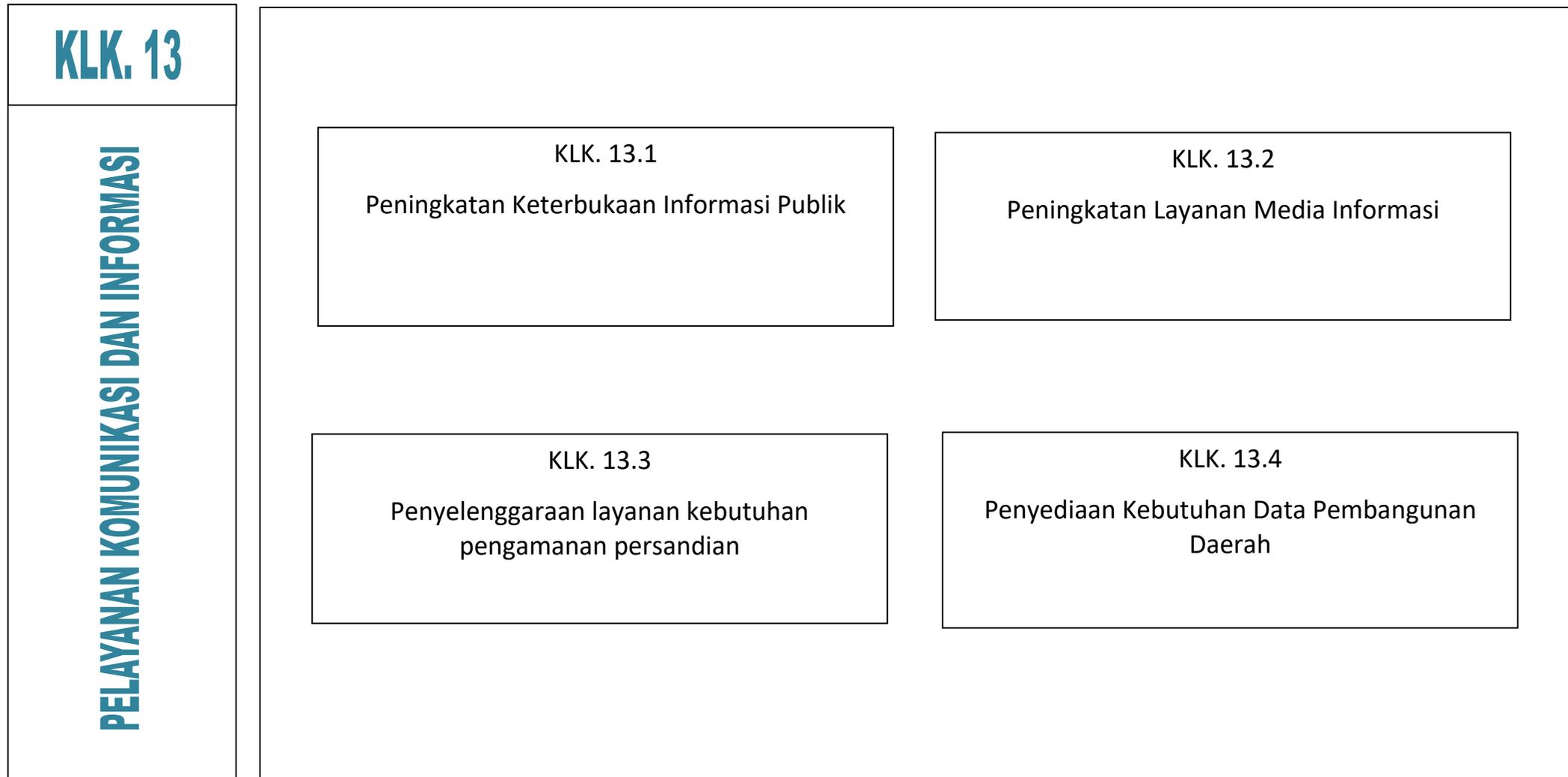


PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1



**PETA PROSES BISNIS PENDUKUNG
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1

KLK. 14

LAYANAN HUKUM

KLK. 14.1

Penyediaan layanan penyusunan peraturan perundang-undangan

KLK. 14.2

Pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum

KLK. 14.3

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

